

Peran Ikhwanul Muslimin terhadap Dinamika Demokrasi di Timur Tengah: Studi Kasus Mesir

The Role of the Muslim Brotherhood in the Dynamics of Democracy in the Middle East: A Case Study of Egypt

Aldrian¹, Nadhita Chilwina², Asgar Naufala Priyanto³, Wildana Wargadinata⁴, Uril Bahruddin⁵

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁵ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹ Email: 230301210018@student.uin-malang.ac.id

Abstrak: Kajian tentang Peran Ikhwanul Muslimin terhadap Dinamika Demokrasi di Mesir sangat penting dikaji. Hal ini disebabkan demokrasi telah menjadi harapan besar bagi masyarakat Timur Tengah yang hingga saat ini terus menghadapi berbagai gejolak politik, salah satunya Mesir. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan strategi atau kebijakan yang telah diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin dalam mendukung perkembangan demokrasi di negara Mesir serta dampak-dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (Library Research) dengan metode kualitatif melalui pendekatan historis dalam memecahkan permasalahan. Data-data tentang demokrasi di Mesir diambil dari sumber-sumber primer yang berkaitan dengan sejarah dan peran Ikhwanul Muslimin dalam demokrasi di Mesir berupa buku-buku, artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data adalah teknik penelitian pustaka dengan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik milik Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 3 strategi Ikhwanul Muslimin terhadap dinamika demokrasi Mesir sebagai berikut: 1. Ikhwanul Muslimin mendorong reformasi politik; 2. Ikhwanul Muslimin meningkatkan kesadaran masyarakat Mesir terhadap demokrasi; 3. Ikhwanul Muslimin berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kata-kata kunci: *Demokrasi; Ikhwanul Muslimin; Mesir*

Abstract: *The study of the Muslim Brotherhood's role in the dynamics of democracy in Egypt is very important. This is because democracy has become a great hope for the people of the Middle East who until now continue to face various political turmoil, one of which is Egypt. This research aims to describe the strategies or policies that have been implemented by the Muslim Brotherhood in supporting the development of democracy in the country of Egypt as well as the impacts that have been felt by the community. This research is a library Research with qualitative methods through a historical approach in solving problems. Data on democracy in Egypt is taken from primary sources related to the history and role of the Muslim Brotherhood in democracy in Egypt in the form of books, journal articles relevant to this research. The data collection technique is library research technique with document analysis. The data analysis technique used is Miles and Huberman's technique, namely: Data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of this research is the existence of 3 Muslim Brotherhood strategies towards the dynamics of Egyptian democracy as follows: 1. the Muslim Brotherhood encourages political reform; 2. the Muslim Brotherhood raises the awareness of the Egyptian people towards democracy; 3. the Muslim Brotherhood participates in politics and increases people's political participation.*

Keywords: Democracy; Egypt; Muslim brotherhood

Pendahuluan

Sistem demokrasi telah menjadi harapan besar bagi masyarakat Timur Tengah yang hingga saat ini terus menghadapi berbagai gejolak politik. Hal ini disebabkan oleh peristiwa Arab Spring pada tahun 2011 yang telah menciptakan semangat untuk menggantikan pemerintahan otoriter dengan demokrasi, dan dianggap sebagai langkah menuju keadilan dan merepresentasikan keinginan rakyat (Rahman, 2019). Dalam paradigma sistem demokrasi, politik selalu dituntut untuk mencerminkan aspirasi rakyat yang terus meningkat. Di sinilah suara rakyat memiliki kedudukan penting (Taufik & Abu, 2020), di mana mereka berhak untuk menentukan pemimpin dengan tujuan menghindari dominasi tunggal oleh kelompok tertentu, yang umumnya terjadi dalam pemerintahan otoriter. Maka dari itu, demokrasi telah dianggap sebagai pembela hak asasi manusia, sebab telah memastikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi serta menyuarakan pendapat.

Demokrasi di Timur Tengah telah menghadapi sejumlah tantangan yang mengiringi perkembangannya. Salah satu hambatan utamanya adalah sektarianisme, yang memecah belah masyarakat berdasarkan faktor agama, suku (Nurali, 2021). Sektarianisme di Mesir ditujukan kepada keadaan rakyat mesir yang memiliki masalah kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta karakter kepemimpinan otoriter Husni Mubarak yang telah berkuasa puluhan tahun (Rahman, 2019). Selain itu, ketidaksetaraan dan tingkat pengangguran yang tinggi yang terjadi di sebagian besar negara di kawasan tersebut menjadi sebuah tantangan yang serius (Maskum & Machmudi, 2023). Tantangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial yang dapat menghambat langkah-langkah menuju demokratisasi. Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi serta dukungan yang diterima dari negara-negara Barat membuka potensi bagi perkembangan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mendominasi Timur Tengah di masa depan.

Demokrasi, sistem pemerintahan yang semakin populer di Timur Tengah, menimbulkan berbagai dampak signifikan yang penting untuk diakui (Sihbudi, 2007). Dampak positif dari peningkatan partisipasi politik masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia mencakup hak untuk memilih pemimpin yang mendorong aktifnya keterlibatan warga dalam politik. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia juga memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat, dan beragama. Meski demikian, dampak negatif hambatan ekonomi seperti masalah kemiskinan dan pengangguran mencerminkan tantangan yang harus diatasi agar dampak positif demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan di Timur Tengah.

Demokrasi di Timur Tengah menjadi subjek perdebatan antara para ahli, yang menciptakan berbagai pandangan pro dan kontra. Maka dari itu, peran Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir menjadi penting untuk diperjelas, terutama terkait konsep demokrasi yang mereka perjuangkan. Ikhwanul Muslimin aktif dalam proses demokrasi melalui integritas nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang dikenal sebagai "demokrasi Islami". Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan demokrasi Barat tidak bisa langsung diterapkan di Timur Tengah karena budaya politik yang dipengaruhi oleh Islam dan otoritarianisme, sehingga memerlukan perubahan sosial dan budaya yang mendalam (Fukuyama, 1992; Huntington, 1996). Sementara itu, pandangan lain menekankan tantangan kompleks dalam memaksakan sistem demokrasi di wilayah ini, termasuk resistensi politik dan budaya serta ketidakstabilan ekonomi (Linz, 1990; Masoud, 2014).

Sebaliknya, sejumlah ahli percaya bahwa demokrasi dapat berkembang di Timur Tengah dengan cara yang unik dan sesuai dengan konteks budayanya. Mereka menggarisbawahi perlunya reformasi bertahap, keberagaman politik, dan penguatan institusi demokrasi seperti peradilan. Dalam konteks ini, "demokrasi Islami" yang diusung oleh IM berupaya menggabungkan nilai-nilai demokrasi Barat dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan budaya lokal (Hamid, 2005; Hashemi, 2009). Ikhwanul Muslimin berargumen bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum dan institusi politik, tetapi juga penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan sesuai ajaran Islam. Namun, pendekatan ini juga menghadapi kritik, baik dari pihak yang menolak integrasi nilai-nilai agama dalam politik maupun dari mereka yang meragukan komitmen Ikhwanul Muslimin terhadap prinsip-prinsip demokrasi universal. Dengan memahami konsep demokrasi yang diperjuangkan oleh Ikhwanul Muslimin dan bagaimana mereka berusaha menerapkannya di Mesir, kita dapat lebih jelas mengapa terdapat pro dan kontra terhadap gerakan politik mereka.

Seluruh pemaparan yang telah dijelaskan di atas terwujud di seluruh Timur Tengah secara menyeluruh, termasuk di negara Mesir. Mesir, sebagai salah satu negara di kawasan tersebut, memiliki sejarah panjang dalam konteks demokrasi. Pada abad ke-19, Mesir bahkan pernah menjadi salah satu negara demokrasi paling maju (Habibi, 2018). Namun, pada abad ke-20, demokrasi di Mesir mengalami kemunduran signifikan ketika bertransformasi menjadi negara otoriter di bawah kepemimpinan rezim Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun. Kesadaran terhadap kesalahan pemerintahan Mubarak menjadi pemicu untuk masyarakat Mesir melakukan Revolusi Arab Spring, yang menjadi lambang kembalinya semangat demokrasi di negara tersebut. Salah satu kekuatan pendorong perubahan ini adalah peran aktif Ikhwanul Muslimin.

Kajian terdahulu berkaitan dengan tema tulisan ini memiliki 2 kecenderungan: *Pertama*, Peran Ikhwanul Muslimin cenderung membahas peran Ikhwanul Muslimin dalam melakukan perubahan mendasar dari sistem pemerintahan sekuler menuju pemerintahan yang menerapkan nilai-nilai Islam (Syahab, 2018), Sejarah dan Gerakan Politik Ikhwanul Muslimin (Jarir, 2019), dan Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin (Ulfah, 2016); *Kedua*, Demokrasi di Timur Tengah cenderung membahas demokratisasi di negara Muslim seperti proses transisi menuju demokrasi yang dialami oleh negara berpenduduk mayoritas muslim seperti di Indonesia dan Mesir (Haura Atthahara, 2017), praktik demokrasi dalam pendidikan Islam dan keberhasilan Pakistan, Mesir dan Turki dalam menginternalisasikan praktik demokrasi ke dalam pendidikan (Durhan, 2019), dan kegagalan demokrasi di Mesir pasca Arab Spring (Samir, 2021). Sedangkan tulisan ini cenderung membahas 3 hal: Peran Ikhwanul Muslimin dalam mendorong reformasi politik; Ikhwanul Muslimin meningkatkan kesadaran masyarakat Mesir terhadap politik dan demokrasi; Ikhwanul Muslimin berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga tulisan ini jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dua aspek utama terkait peran Ikhwanul Muslimin dalam memajukan demokrasi di Mesir, yaitu strategi atau kebijakan yang telah diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin dalam mendukung perkembangan demokrasi di negara Mesir serta dampak-dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat Mesir sebagai hasil dari masing-masing strategi Ikhwanul Muslimin yang berupaya memajukan demokrasi di negara mereka. Dengan memfokuskan tujuan tulisan

pada dua hal tersebut, diharapkan paparan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi Ikhwanul Muslimin terhadap dinamika demokrasi di Mesir. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar tiga sebab, yaitu: pertama, secara historis penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang peran Ikhwanul Muslimin dalam proses demokratisasi di Mesir; kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi para pembuat kebijakan di Mesir dalam upaya mereka untuk memperkuat sistem demokrasi; dan ketiga, penelitian ini dapat menjadi alat perbandingan antara Ikhwanul Muslimin dengan gerakan Islam lainnya di kawasan Timur Tengah yang ingin mendorong reformasi politik. Ketiga argumentasi tersebut menjadi landasan dilaksanakannya penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian kepustakaan dan pendekatan historis untuk menjelajahi peran Islam terhadap demokrasi di Mesir. Data tentang demokrasi di Mesir diperoleh dari sumber-sumber primer yang berkaitan dengan sejarah Ikhwanul Muslimin, termasuk buku dan jurnal. *Library research* digunakan sebagai metode pengumpulan data, memanfaatkan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami serta mempelajari data-data tentang perkembangan Ikhwanul Muslimin di Mesir dari berbagai literatur (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah milik (Miles & Huberman, 1992), yaitu: reduksi data, dengan meringkas dan mengkategorikan data berdasarkan sub hasil penelitian; penyajian data dalam bentuk narasi; dan penarikan kesimpulan dengan meninjau kembali tujuan penelitian dan menyesuaikannya dengan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti mengulas peran Ikhwanul Muslimin terhadap dinamika demokrasi Mesir melalui sejarahnya. Peran tersebut diulas berdasarkan penjelasan strategi apa saja yang mereka terapkan untuk memajukan demokrasi di Mesir dan dampak yang dihasilkan dari setiap strategi tersebut. Pemaparan dilakukan dengan menyajikan data yang relevan dalam bentuk narasi, dan terfokus pada tujuan penelitian. Berikut penjelasannya:

Ikhwanul Muslimin Mendorong Reformasi Politik

Sejak Perang Dunia II berakhir, demokrasi telah menyebar ke berbagai negara, termasuk di negara-negara berpenduduk muslim. Demokrasi merupakan sistem politik yang menjamin kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (Astawa, 2017). Pemilihan umum secara berkala menjadi sarana untuk memilih pemimpin negara, dan melalui mekanisme ini, keinginan politik rakyat dapat diungkapkan. Perubahan signifikan terjadi dalam arah demokratisasi pemerintahan lokal di berbagai negara, diwujudkan melalui reformasi politik dan dorongan menuju desentralisasi serta pemberdayaan pemerintahan lokal (Syahab, 2018).

Sejak awal berdirinya, Ikhwanul Muslimin telah mengarahkan pergerakannya untuk berfokus pada pengabdian kepada agama dan masyarakat. Organisasi ini mendidik kader-kadernya agar taat kepada Allah swt, yang berarti melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu perintah Allah yang ditekankan adalah jihad

untuk menegakkan kebenaran. Jihad tidak hanya diartikan sebagai perjuangan dengan mengangkat senjata di medan tempur, melainkan juga usaha dalam berbagai bidang, termasuk dalam ranah politik (Rosidin, 2020). Gerakan Ikhwanul Muslimin telah menciptakan kader-kader militan yang memiliki cinta kepada Allah. Individu yang memiliki cinta kepada Allah cenderung takut melakukan maksiat, baik dalam keramaian maupun keadaan sepi. Militansi ini menjadi kekuatan bagi kader Ikhwanul Muslimin dalam menghadapi gejolak politik. Saat terjadi kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi, semangat militansi para kader Ikhwanul Muslimin kembali berkobar (Rosidin, 2020).

Pada bulan Dzulhijjah 1359 H/1941 M, Ikhwanul Muslimin menyelenggarakan Munas VI. Dalam kegiatan Munas ini, diambil keputusan untuk membentuk dewan pendiri yang nantinya akan berfungsi sebagai Majelis Syura Ikhwanul Muslimin. Tugas utama Majelis Syura ini adalah merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*Hai'ah Ta'sisiyyah*) sebagai landasan organisasi Ikhwanul Muslimin. Keputusan lain yang diambil dalam Munas ini adalah memberikan izin kepada anggota Jamaah untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan senat (Farida, 2014). Pada tahun yang sama, terjadi pengembangan dengan pembentukan tim dakwah keliling yang dipimpin langsung oleh Imam Hasan al-Banna. Selain itu, dipilih pula Syaikh Mahmud Labib sebagai Inspektur Jenderal, menunjukkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Ikhwanul Muslimin untuk memperluas dan memperkuat dakwah mereka dalam berbagai aspek sebagai bentuk peran mereka dalam memulai reformasi politik (Farida, 2014).

Setelah tersusunnya tim dakwah keliling, Ikhwanul Muslimin berkembang sangat pesat. Hal ini membuat kekhawatiran pemerintah Mesir bertambah, karena Ikhwanul Muslimin kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pada saat itu, Ikhwanul Muslimin menghadapi berbagai tekanan dari pemerintah Mesir, termasuk tindakan-tindakan yang merugikan. Salah satunya adalah pemindahan paksa Hasan al-Banna ke Qona pada tanggal 20 Mei 1941. Selain itu, majalah-majalah yang memiliki afiliasi dengan Ikhwan, seperti *al-Manar*, *Syu'a*, dan *Ta'awun*, mengalami pembredelan. Tindakan-tindakan represif ini menciptakan kondisi sulit bagi Ikhwanul Muslimin di bawah pemerintahan Mesir pada waktu itu (Farida, 2014). Pada bulan Oktober 1944, setelah Ahmad Mahir Pasha yang bertanggung jawab menyusun kabinet membubarkan DPR dan mulai mempersiapkan pemilu, Ikhwanul Muslimin ikut bersaing dalam pemilu ini dengan program Islami (Farida, 2014). Pada bulan Syawal 1364 H/2 September 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Ikhwanul Muslimin mengadakan pertemuan dalam sebuah majelis umum. Dalam pertemuan ini mereka menetapkan Dewan Pendiri, lalu kekuasaan dibagi menjadi Dewan Pendiri, Pemimpin Umum dan Pimpinan Pusat (Farida, 2014).

Ikhwanul Muslimin kemudian menuntut raja Faruq dan Shidqi untuk mengumumkan jihad melawan kolonial Inggris dan memutuskan hubungan ekonomi, budaya dan sosial dengannya. Ismail Shidqi dianggap belum mewakili masyarakat Mesir karena tidak menghargai pendapat mereka. Sikap politik gerakan ini mendapat simpati masyarakat dan memotivasi mereka untuk melakukan reformasi di Mesir. Sepulangnya (Ismail Shidqi) dari perundingan di London ia mendapat oposisi dari beberapa pihak diantaranya tujuh anggota partai politik *al-Wafd*. Sebulan setelah kepulangannya terjadilah pemberontakan besar di Mesir. Pemerintah kemudian meliburkan Universitas untuk sementara waktu dan menangkap beberapa anggota partai *al-Wafd*, komunis dan Ikhwanul Muslimin (Sulaiman, 2014).

Ikhwanul Muslimin mensponsori demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa selama dua hari, pada tanggal 9-10 Pebruari 1946, sebagai protes terhadap penolakan pemerintah Inggris atas memorandum yang dikirim pemerintah Mesir. Demonstrasi ini cukup berhasil yang ditandai dengan mundurnya pemerintahan an-Nuqrasyi Pasha pada tanggal 15 Pebruari 1946, lima hari setelah demonstrasi tersebut (Farida, 2014). Pada tahun 1365 H, tepatnya bulan Mei 1946, Ikhwanul Muslimin memperoleh izin untuk menerbitkan surat kabar Ikhwanul Muslimin. Keberadaan surat kabar ini menandai titik perubahan yang signifikan dalam bidang dakwah dan informasi bagi organisasi tersebut. Dengan adanya surat kabar, Ikhwanul Muslimin memiliki lebih banyak ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Pemimpin Ikhwanul Muslimin, atas nama jamaah, mengumumkan bahwa berbagai negosiasi dengan Inggris dianggap tidak memberikan hasil yang berarti. Ia mendorong para anggota untuk mempersiapkan kekuatan, karena hak-hak mereka tidak akan diperoleh begitu saja, melainkan melalui kekuatan dan jihad (Farida, 2014).

Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam peperangan Palestina. Mereka mulai memasuki medan pertempuran dengan membawa pasukan-pasukan khusus. Para sukarelawan Ikhwanul Muslimin saling bahu-membahu dengan pasukan Mesir dan Palestina dalam melawan Israel (Farida, 2014). Keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam Perang Palestina ini sebelum dan sesudah masuknya tentara-tentara Arab di Palestina pada tahun 1948 dengan jumlah lebih dari 300 pasukan yang siap tempur (Sulaiman, 2014).

Ikhwanul Muslimin mempunyai pengaruh yang kuat terhadap organisasi-organisasi profesi dan aktivis pergerakan. Dengan bekerja dalam sistem politik yang ada, para aktivis Ikhwanul Muslimin menuliskan kritikan dan tuntutan dalam rangka menyerukan demokrasi yang lebih besar, perwakilan politik yang lebih aspiratif, keadilan sosial dan membela kepentingan masyarakat (Farida, 2014), sehingga dalam hal ini Ikhwanul Muslimin memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong reformasi politik di Mesir. Strategi politik Ikhwanul Muslimin didalam Mesir adalah dengan menggunakan soft power dan hard power. Salah satunya bentuk hard power adalah dengan melakukan aksi unjuk rasa sehingga dibebaskannya anggota Ikhwanul Muslimin yang ditangkap oleh militer Mesir dan juga dihindarkan dari hukuman mati. Selain itu, Ikhwanul Muslimin juga melakukan gugatan ke mahkamah internasional atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Mesir yang dipimpin oleh presiden El Sisi. Selain itu, beberapa contoh soft power adalah mogok makan, jahit mulut, dan sebagainya. Dari strategi politik inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan di Mesir dari segi politik (Ma'ruf, 2020). Hal lain ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran politik di Mesir. Salah satu contohnya ditujukan kepada situasi setelah mobilisasi politik selama pemberontakan Januari 2011, 'semua orang berbicara tentang politik' (Ibrahim, 2021).

Ikhwanul Muslimin Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mesir Terhadap Demokrasi

Ikhwanul Muslimin telah mengimplementasikan strategi yang beragam untuk memperluas pemahaman masyarakat Mesir tentang politik dan demokrasi. Mereka melibatkan strategi pendidikan, propaganda, kegiatan sosial, dan media sosial sebagai alat-alat yang efektif dalam menyebarkan pengetahuan politik. Dengan optimisme yang mereka miliki tentang peningkatan kesadaran politik akan menjadi dasar yang kuat, Ikhwanul Muslimin berharap dapat membantu Mesir membangun fondasi demokrasi yang

berkelanjutan. Strategi Ikhwanul Muslimin dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Mesir terhadap politik dan demokrasi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

Strategi pendidikan, Ikhwanul Muslimin telah mendirikan lebih dari 2.500 sekolah dan universitas di Mesir dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat (Langohr, 2005). Menurut Shadi Hamid, lembaga pendidikan ini telah mencapai jutaan siswa dan mahasiswa di Mesir (Hamid, 2014). Dalam hal ini, fokus utama Ikhwanul Muslimin adalah mengajarkan nilai-nilai demokrasi, termasuk konsep kebebasan, persamaan, dan *rule of law* yang berdasarkan syariat agama islam, sebagai bagian integral dari pengajaran di sekolah-sekolah dan universitas yang mereka dirikan.

Strategi propaganda, Ikhwanul Muslimin menggunakan propaganda dengan menerbitkan lebih dari 100 buku dan majalah tentang demokrasi (Brown, 2008). Melalui berbagai publikasi ini, gerakan ini aktif mempromosikan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat Mesir dan mencapai jutaan pembaca. Selain melalui propaganda, Ikhwanul Muslimin juga terlibat dalam kegiatan sosial dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Upaya ini bukan hanya sebagai bentuk keterlibatan kemanusiaan, tetapi juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran politik di berbagai lapisan masyarakat Mesir.

Strategi kegiatan sosial, Ikhwanul Muslimin telah aktif dalam kegiatan sosial dengan membangun lebih dari 1.000 rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya di Mesir (Esposito, 1999). Upaya ini telah memberikan bantuan kepada jutaan orang Mesir yang membutuhkan, menunjukkan kontribusi positif gerakan ini terhadap masyarakat melalui inisiatif kemanusiaan yang signifikan. Selain itu, gerakan ini juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana modern untuk memperluas jangkauan pesan politik dan demokrasi. Dengan membuat berbagai akun media sosial, Ikhwanul Muslimin berhasil mencapai khalayak yang lebih luas dan beragam.

Semua upaya tersebut membantu Ikhwanul Muslimin mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan kesadaran politik di Mesir. Bahkan, strategi-strategi yang telah disebutkan juga berhasil memengaruhi perkembangan politik bagi negara luar Mesir, seperti Turki dan Qatar (Samoilova, 2023). Diantara bentuk kesadaran yang terbangun antara lain meningkatnya partisipasi politik warga dalam pemilihan umum, meningkatnya pemahaman tentang hak-hak asasi manusia, semakin banyaknya diskusi publik mengenai isu-isu politik, dan bertambahnya jumlah warga yang aktif dalam organisasi masyarakat sipil (Gomaa & Ozalp, 2022). Kesadaran ini tercermin dari penetrasi gerakan ini di berbagai segmen masyarakat (Abed-Kotob, 1995), mencakup seluruh pekerja dan intelektual. Strategi-strategi ini dianggap berhasil dalam mencapai kesadaran politik yang lebih luas dan merangkul berbagai segmen masyarakat Mesir tanpa terkecuali.

Ikhwanul Muslimin Berpartisipasi Dalam Politik Dan Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi keagamaan yang dianggap sebagai nuansa dan inovasi tertentu, organisasi yang menjadi arus utama dan pemicu dari munculnya gerakan-gerakan lain. Ikhwanul Muslimin tidak seperti sistem otoriter yang tidak mampu mendengar aspirasi rakyat Mesir (Utami, 2017). Dampak dari itu adalah mudahnya tersebarnya dakwah Ikhwanul Muslimin kepada rakyat Mesir. Bahkan tidak hanya dalam soal dakwah, dalam soal politik dan sosial pengaruh Ikhwanul Muslimin sangat besar di dalam itu. Hasan Al-Banna mendukung Gerakan sosial politik guna memperbaiki umat (*islah al-ummah*).

Dalam perjalanannya, Ikhwanul Muslimin berpartisipasi dan berpengaruh dalam politik kenegaraan negara Mesir (Yani, 2014). Hal ini ditandai dengan beberapa kegiatan dan peristiwa yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Diantaranya adalah diadakannya Munas (Musyawarah Nasional) oleh Ikhwanul Muslimin pada bulan Dzulhijjah tahun 1359 H/1941 M. Urgensi diadakannya Munas ini adalah membentuk sebuah dewan yang akan menjabat sebagai Majelis Syura dari Ikhwanul Muslimin. Adapun hasil Munas ini adalah bagi anggota Ikhwanul Muslimin yang ingin memilih atau menunjuk anggota parlemen dan senat, maka diperbolehkan untuk melakukan itu. Kemudian hasil yang lain adalah ditunjuknya Hasan Al-Banna sebagai pemimpin dari tim dakwah keliling yang akan menyebar ke Masyarakat (Farida, 2014).

Kemudian pada bulan Syawal tahun 1364 H/1941 M, Ikhwanul Muslimin mengadakan perkumpulan yang bersifat khusus. Perkumpulan ini menghasilkan beberapa hasil diantaranya adalah ditetapkan beberapa dewan di dalam Ikhwanul Muslimin. Diantaranya adalah Pimpinan Pusat, Pemimpin Umum dan Dewan Pendiri. Hasil yang lain dibentuknya divisi khusus yang bertujuan untuk mengadakan kegiatan sosial dan muktamar-muktamar di daerah daerah dengan harapan kegiatan ini bisa membuka mata rakyat Mesir akan kesadaran untuk mengusir penjajah Inggris dari tanah Mesir (Farida, 2014).

Selanjutnya pada Mei tahun 1946, surat kabar yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin diizinkan oleh pemerintah untuk menerbitkan dan menyebarkan surat kabar milik mereka. Dampak dari itu adalah dapat diaksesnya dakwah Ikhwanul Muslimin melalui media cetak dan dapat dinikmati oleh rakyat Mesir saat itu. Dengan diizinkan terbitnya surat kabar milik Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin dapat menyebar pengaruh mereka seperti percumanya negosiasi yang dilakukan Mesir atas Inggris. Kemudian Ikhwanul Muslimin dalam surat kabarnya juga menghimbau rakyat Mesir untuk mempersiapkan kekuatan untuk mengusir Inggris sebagai bentuk Jihad seorang Muslim. Dampak dari apa yang dilakukan Ikhwanul Muslimin diatas adalah tidak setujunya pemerintah atas apa yang dilakukan Ikhwanul Muslimin diatas. Kemudian dampak tersebut menyebar luas menjadi segala kegiatan yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dilarang oleh pemerintah, menangkap tokoh aktivis Ikhwanul Muslimin tanpa alasan yang jelas.

Dan pada tahun yang sama juga, Ikhwanul Muslimin menetapkan hari pembakaran. Hari pembakaran merupakan hari dimana buku-buku, majalah dan surat kabar yang berbahasa Inggris dibakar. Tujuannya adalah sebagai bentuk penolakan rakyat Mesir terhadap Inggris dan bentuk tuntutan rakyat Mesir agar Inggris meninggalkan tanah Mesir. Kegiatan ini menyebabkan banyak tokoh besar Ikhwanul Muslimin ditangkap atas perintah Shidqi Pasha. Dan respon pemerintah atas gejolak yang semakin menjadi-jadi ini juga semakin dahsyat. Gejolak ini disebabkan karena banyaknya aktivis Ikhwanul Muslimin yang ditangkap, kemudian banyaknya sekolah dan universitas yang ditutup oleh pemerintah. Karena gejolak yang tidak kunjung padam, Shidqi Pasha pun mengundurkan diri untuk meredam gejolak massa yang semakin menjadi-jadi pada tanggal 8 Desember 1946. Kemudian saat tampuk kekuasaan Ikhwanul Muslimin dipegang oleh Hasan al-Hudaibi, konflik antara Mesir dan Inggris semakin memanas. Konflik yang menyebabkan perang gerilya yang dilakukan Ikhwanul Muslimin melawan Inggris di Teusan Suez.

Ketika Ikhwanul Muslimin dipegang oleh Hasan al-Hudaibi, ketegangan antara Inggris dan Mesir memuncak, khususnya pada bulan Oktober 1951 M. Sehingga Ikhwanul Muslimin mengadakan perang gerilya melawan Inggris di Terusan Suez. Kemudian pada Juli 1952,

Ikhwanul Musliin mendukung kudeta militer yang dipimpin oleh Muhammad Najieb yang diberi nama Revolusi Juli. Tetapi kemudian, Ikhwanul Muslimin menolak terlibat dalam pemerintahan karena menurut mereka, hasil dari revolusi militer tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab (Farida, 2014).

Berdasarkan pemaparan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu organisasi Islam yang sangat berperan dalam menghidupkan sistem demokrasi di Mesir. Peran tersebut dapat dilihat dari berbagai strategi yang mereka lakukan dalam mewujudkan demokratisasi di negara tersebut, yaitu: pertama, Ikhwanul Muslimin mendorong reformasi politik; kedua, Ikhwanul Muslimin meningkatkan kesadaran masyarakat Mesir terhadap demokrasi melalui bidang pendidikan, strategi propaganda, dan melalui partisipasi kegiatan sosial; dan ketiga, Ikhwanul Muslimin berpartisipasi dalam politik serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Temuan-temuan di atas dapat diinterpretasikan ke dalam 3 poin: pertama, peran penting yang dimiliki Ikhwanul Muslimin dalam mendorong perubahan sistem politik Mesir melalui berbagai cara, termasuk: berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengembangkan kesadaran politik masyarakat, dan mengkritik kebijakan pemerintah Ikhwanul Muslimin telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mesir; kedua, Organisasi ini telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat Mesir untuk terlibat dalam politik, termasuk mendirikan sekolah dan universitas, melakukan kegiatan sosial, dan memanfaatkan media massa. Ketiga, Ikhwanul Muslimin telah menjadi kekuatan politik yang signifikan di Mesir, hal ini dapat dilihat dari sejarahnya yang memenangkan kursi di parlemen dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Mesir.

Selain itu, temuan-temuan di atas juga menunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin telah menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi di Mesir melalui berbagai upaya, seperti partisipasinya dalam pemilihan umum, mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak demokratis, dan mengembangkan kesadaran politik masyarakat (Manan, 2020). Upaya tersebut telah berkontribusi pada reformasi politik, termasuk perubahan dalam sistem pemilihan umum, peningkatan kebebasan pers, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, melalui pendirian sekolah dan universitas, propagandanya yang cukup besar, kegiatan sosial, dan pemanfaatan media massa, Ikhwanul Muslimin telah berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mengajarkan nilai-nilai demokrasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini. Peningkatan partisipasi politik masyarakat Mesir ditandai dengan adanya demonstrasi yang dilakukan pada saat kepemimpinan Husni Mubarak. Demonstrasi ini menyebabkan fenomena bernama Arab Spring yang menyebabkan lengsernya Husni Mubarak dan menyebabkan adanya pergantian kepemimpinan di Mesir. Pasca kejadian Arab Spring tersebut muncullah sistem pemilihan umum (Pemilu) Presiden di Mesir. Pelaksanaan pemilu pertama di Mesir adalah setelah kejadian Arab Spring yang menyebabkan lengsernya Husni Mubarak. Pemilu di Mesir ini menjadikan Muhammad Mursi terpilih sebagai persiden Mesir selanjutnya. Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir merupakan satu-satunya Presiden yang terpilih secara demokratis di Mesir (Manan, 2020). Sebagai kekuatan politik yang signifikan di Mesir, Ikhwanul Muslimin dapat memainkan peran penting dalam menentukan arah politik di masa depan, menjadi pendorong bagi demokrasi atau potensial ancaman terhadap demokrasi di negara tersebut.

Simpulan

Perkembangan demokrasi di Mesir merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat Mesir sejak dahulu. Karena konsep demokratis lebih baik dibandingkan dengan konsep otoriter yang pemerintahannya dikuasai oleh sebagian kalangan. Sebelum Ikhwanul Muslimin didirikan, Mesir dipimpin oleh penguasa yang otoriter. Ikhwanul Muslimin membawa konsep demokrasi islami yang menggabungkan konsep demokrasi dari barat dengan konsep agama islam. Kehidupan demokrasi di Mesir mulai hilang sejak kepemimpinan otoriter Husni Mubarak selama beberapa tahun. Ikhwanul Muslimin memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Mesir, memiliki peran penting juga dalam perpolitikan Mesir. Pengaruh luas Ikhwanul Muslimin di perpolitikan sangat kuat sehingga rezim pemerintahan Mesir masa itu melarang kegiatan yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin. Dalam hal demokrasi di Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin telah memberikan berbagai pencerahan serta pemahaman kepada Masyarakat Mesir mengenai sosial dan demokrasi. Berbagai strategi telah dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dalam menyebarkan pengetahuan politik dan demokrasi terhadap masyarakat Mesir. Kemudian pada tahun 2011 terjadilah insiden Arab Spring yang meruntuhkan masa kepemimpinan Otoriter Husni Mubarak. Setelah lengsernya Husni Mubarak, demokrasi di Mesir mulai hidup kembali dengan diadakannya pemilihan umum Presiden Mesir.

Penelitian ini membahas peran Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah sebagai sumber referensi bagi penelitian mendatang dengan tema terkait. Tujuannya adalah memberikan kontribusi tambahan pada pengetahuan pembaca dan mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut. Peneliti menyadari keterbatasan penelitian ini dan berharap agar penelitian masa depan terkait tema ini dapat meningkat dalam aspek kepenulisan, isi, dan konten. Kritik serta saran konstruktif sangat diharapkan untuk memperkaya pembelajaran dan menjadi refleksi bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya.

Daftar Rujukan

- Abed-Kotob, S. (1995). The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood of Egypt. *International Journal of Middle East Studies*, 27(3), 321–339. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/176254>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Astawa, I. P. (2017). *Demokrasi Indonesia*. Bali: Bali: Universitas Udayana.
- Brown, N. J. (2008). *Kuwait 's 2008 Parliamentary Elections: A Setback for Democratic Islamism?* Washington: Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Durhan, D. (2019). Internalisasi Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Islam (Belajar dari Praktik Demokrasi dalam Pendidikan Islam di Pakistan, Mesir dan Turki). *Ahsana Media*, 5(1), 50–59.
- Esposito, J. L. (1999). *The Oxford History of Islam*. Oxford: Oxford: Oxford University Press.
- Farida, U. (2014). Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 45–70.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. New York: New York: The Free Press.

- Gomaa, O., & Ozalp, M. (2022). Why Did We Disown the Muslim Brotherhood? *International Journal of Islamic Thought*, 22(1), 105–113. Retrieved from <http://www.ukm.my/ijit/wp-content/uploads/2022/11/Omar-IJIT-Vol-22-Dec-2022-edited.pdf>
- Habibi, D. F. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam Di Timur Tengah (Studi Kawasan Mesir Dan Turki). *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4 (2)(2), 31–43.
- Hamid, S. (2005). Islam and Democracy in the Middle East: By Larry Diamond, Marc F. Plattner, and Daniel Brumberg, eds. (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003. 322 pages.). *American Journal of Islam and Society*, 22(3), 128–131.
- Hamid, S. (2014). *Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle East*. Oxford University Press. Oxford: Oxford: Oxford University Press.
- Hashemi, N. (2009). *Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*. New York: New York: Oxford University Press.
- Haura Atthahara. (2017). Demokratisasi Di Negara Muslim : Transisi Menuju Demokrasi Pada Masa Reformasi 1998 Di Indonesia Dan Gejolak Revolusi Mesir 2011. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 1–13.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: New York: Simon & Schuster.
- Ibrahim, S. (2021). The Dynamics of the Egyptian Social Contract: How the Political Changes Affected the Poor. *World Development*, 138, 105254. The Author. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105254>
- Jarir, A. (2019). Sejarah dan Gerakan Politik Ikhwanul Muslimin. *Aqlania*, 10(1), 1.
- Langohr, V. (2005). Colonial education systems and the spread of local religious movements: The cases of British Egypt and Punjab. *Comparative Studies in Society and History*, 47(1), 161–189.
- Linz, J. J. (1990). Transitions to democracy. *Washington Quarterly*, 13(3), 143–164.
- Ma'ruf, T. I. (2020). Strategi Politik Ikhwanul Muslimin terhadap Kebijakan Pemerintah Mesir Pasca Digulingkannya Mursi. *Jurnal Dinamika Global*, 5(02), 219–237. Retrieved from <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/239>
- Manan, P. R. (2020). People Power Dalam Suksesi Kepemimpinan Di Mesir. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 73–92. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/wanua/article/view/14072>
- Maskum, A. B., & Machmudi, Y. (2023). Masa Depan Demokrasi Mesir Pasca-Arab Spring. *Jurnal ICMES*, 7(1), 41–61.
- Masoud, T. (2014). *Counting Islam: Religion, Class, and Elections in Egypt (Problems of International Politics)*. Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI-Press.
- Nurali, R. A. (2021). Perkembangan Demokrasi Di Tunisia. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 20(2), 163.
- Rahman, S. (2019). Tensi Sektarianisme Dan Tantangan Demokrasi Di Timur Tengah Pasca Arab Spring. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 12(2), 111.

- Rosidin, S. (2020). Ikhwanul Muslimin : Pemikiran dan Pergerakan Sosial-Politik Islam Abad 20 di Mesir. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*, 178–190.
- Samir. (2021). Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring The Failure of Democratization in Egypt Post Arab Spring. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 159–171. Retrieved from <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Samoilova, E. E. (2023). The Presence of the Muslim Brotherhood in the Media Space of Turkey to Maintain Political Participation after the Events of the Arab Spring in Egypt. *Oriental Courier*, (2), 125. Retrieved from <https://oriental-courier.ru/s268684310026693-0-1/>
- Sihbudi, M. R. (2007). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Sulaiman, R. (2014). Ikhwanul Muslimin dan Politik Kenegaraan Mesir. *Madania*, 18(2), 243–260.
- Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin Dan Demokrasi Di Mesir. *TAJDIR: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 191–208.
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam Dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1–14.
- Ulfah, N. M. (2016). Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin. *Jurnal SMART: Studi Masyarakat Religi dan Tradisi*, 2(2), 213–224.
- Utami, S. F. (2017). Manifestasi Sistem Pemerintahan Otoriter dalam Novel Faraj Karya Radwa Ashour dan Novel Pulang Karya Leila S. Chudori. *Diwan*, 9(17), 660–673.
- Yani, M. T. (2014). Wacana Pemerintahan Demoktis dan Dinamika Politik di Negeri-negeri Timur Tengah: Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 121.